**HUBUNGAN KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (KNIP)
DENGAN LEMBAGA KEPRESIDENAN
PADA TAHUN 1945-1949**

Dwi Indri Astuti, Iskandar Syah dan Syaiful M

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

e-mail: dwiindri316@yahoo.com.

Hp. 085769993383

The objective of this research is to find out relation between national committee of central Indonesia and presidential institution in 1945-1949. This research used historic method. Literature technique and documentation were used in collecting data. Meanwhile in order to analyze the data. The researcher used qualitative data analysis in the research. The researcher found there is a relation between Nasional committee of central Indonesia and presidential institution in working their duties together with the president, therefore the relation between National committee of central Indonesia and presidential institution runs well, it is proved in every government work program which is done together.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kerjasama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan Komite Nasional Indonesia Pusat dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949 dilihat dari tugas yang dilakukan KNIP bersama Presiden, sehingga hubungan kerjasama yang terjalin antar KNIP dengan Lembaga Kepresidenan sangat baik dengan terbukti segala program kerja pemerintah dapat disepakati bersama.

Kata kunci : hubungan, knip, lembaga kepresidenan

PENDAHULUAN

Pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, memilih dan mengangkat ketua dan wakil ketua PPKI masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama (Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI), dan pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Pusat yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Noer, (2005: 16).

Sejak ketetapan PPKI tersebut merupakan awal dari terbentuknya Lembaga Kepresidenan, karena dalam ketetapan ini menunjuk Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintahan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan sistem pemerintahan Indonesia adalah Sistem Presidensial yakni kekuasaan tertinggi di tangan Presiden. Dalam melaksanakan pekerjaan pemerintah Presiden dibantu oleh sebuah badan yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang tercantun pada Undang – Undang Dasar Aturan Peralihan pasal IV disebutkan sebelum

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan segala bantuan sebuah Komite Nasional. Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Pemerintah Pasal IV Undang – Undang Dasar 1945 tersebut, maka dibentuk sebuah Komite Nasional yang tugasnya membantu pekerjaan presiden Noer, (2005: 16). Keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat sendiri diambil dari beberapa anggota dari PPKI. KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta.

Pada tanggal 29 Agustus malam bertempat di gedung Komidi Pasar Baru, Jakarta, pengurus dan anggota KNIP dilantik, dan sidang pertamanya dimulai sesudahnya. Sidang ini diketuai Kasman Singodimejdo, sebagai ketua Panitia Eksekutif. Kasman Singodimejdo, sebagai ketua Panitia Eksekutif, selesai pidato pembukaannya menghadap presiden dengan berdiri sebagai perwira bawahan dan menyatakan “siap sedia menjalankan perintah”. Maka presiden pun melantik segenap anggota. Ia menegaskan bahwa “kekuasaan adalah di tangan presiden...” berarti KNIP merupakan pembantu untuk menjalankan kekuasaan ini Noer, (2005:23).

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) ini diakui merupakan cikal bakal dari badan legislatif di Indonesia dan KNIP diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 sehingga tanggal 29 Agustus dijadikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Setelah kerja keras yang dilakukan PPKI, akhirnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelesaikan tugasnya pada tanggal 21 Agustus 1945. Mereka berhasil merumuskan kriteria dan tata kerja KNIP dalam arti Pasal IV Aturan Pemerintah UUD 1945.

Dengan memperhatikan kriteria dan tata kerja KNIP dalam arti pasal IV Aturan

Pemerintah UUD 1945 yang tertera di atas dapat ditegaskan bahwa KNIP merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan sistem Pemerintah karena, KNI juga merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, alat yang menerjemahkan kebijakan pemerintah kepada rakyat dan menyampaikan keinginan rakyat pada pemerintah dan alat yang memajukan kesejahteraan umum dan menjaga ketentraman keselamatan umum Noer, (2005: 20).

Mengingat pada awal kemerdekaan keadaan dan situasi Negara Indonesia pada saat itu belum begitu aman dan melihat dari Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 ditentukan dalam keputusan baru. Keadaan Indonesia yang tidak tenang mengakibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) belum dapat dibentuk. Padahal kita harus menunjukkan bahwa Indonesia sudah mampu mengatur Negara dan pemerintahan yang berasaskan demokrasi. Untuk itu keluarlah Maklumat wakil Presiden No. X (dibaca eks) pada tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat Wakil Presiden No. X ini memenuhi keputusan KNIP yang mengembangkan kedudukan dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

Setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni Komite Nasional Indonesia pusat (KNIP) disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga kedudukan KNIP semakin penting dalam sistem pemerintah. Setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X kekuasaan presiden berkurang karena kedudukan KNIP yang pada awal kemerdekaan sebagai pembantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan tetapi setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden KNIP diberikan wewenang sebagai lembaga legislatif, sehingga sistem pemerintahan Indonesia yang awal

kemerdekaan sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, karena penelitian ini mengambil obyek peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Metode sejarah di sini adalah suatu proses menguji menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.

Metode sejarah sebagai suatu proses yang telah dilaksanakan oleh sejarawan dalam usaha mencari, mengumpulkan, menguji, memilih, memisah dan menyajikan fakta sejarah serta tafsirannya dalam susunannya yang teratur.

Menurut Nugroho Notosusanto bahwa metode sejarah ialah “Sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintese dari pada hasil-hasilnya (biasanya dalam bentuk tertulis)” Notosusanto, (1964: 10-11).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode historis adalah suatu cara di dalam proses pengujian dan analisis data yang sudah terkumpul untuk dijadikan bahan sejarah yang tertulis. Adapun langkah-langkah dalam penelitian historis, yaitu.

1. Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah
2. Kritik yaitu menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah itu asli, baik isi maupun bentuknya
3. Interpretasi yaitu setelah memperoleh fakta yang diperlukan, maka kita harus merangkaikan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal

4. Historiografi yaitu merupakan kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil penelitian Notosusanto, (1964 : 11).

Menurut Suharsimi Arikunto, variabel penelitian adalah objek suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian Arikunto, (1998: 91). Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan variabel adalah suatu gejala yang akan menjadi objek pengamatan Arikunto, (1998: 126).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud variabel adalah sesuatu obyek yang menjadi sentrum kajian dalam sebuah penelitian. Variable dalam penelitian ini adalah hubungan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949 dengan objek penelitiannya adalah Komite Nasional Indonesia Pusat.

Dalam penelitian memerlukan data karena itu dilakukanlah kegiatan pengumpulan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai penelitian yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan dua teknik yaitu teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi.

Teknik kepustakaan adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya dalam bentuk koran, naskah, catatan, kisah sejarah dokumen-dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian Koentjoroningrat, (1983: 133). Berguna sebagai sumber berbagai informasi baik berupa teori-teori, generalisasi maupun konsep yang dikemukakan oleh para ahli yang ada pada sumber kepustakaan, dengan jalan mempelajari buku atau literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan peneliti bahas. Data-data berasal dari sumber-sumber informasi yang berupa buku-buku referensi (bahasa asing atau bahasa indonesia/terjemahan) surat kabar atau

majalah, foto-foto maupun peta yang relevan. Kegiatan ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah Lampung dan Perpustakaan Sejarah.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seseorang melalui catatan pribadinya Fathoni, (2006: 112). Digunakan untuk memperoleh data masa lampau dan data masa sekarang, sebab bahan-bahan dokumentasi mempunyai arti metodologi yang sangat penting dalam penelitian masyarakat yang mengambil orientasi historis.

Data-datanya berasal dari sumber-sumber informasi berupa buku-buku referensi, surat kabar atau majalah dan foto-foto yang relevan dan berkaitan dengan tema penulisan yakni hubungan kelembagaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Lembaga Kepresidenan.

Setelah data penelitian diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisis data untuk diinterpretasikan dalam jawaban permasalahan penelitian yang telah diajukan. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif.

Adapun definisi penelitian kualitatif menurut P. Joko Subagyo adalah Penelitian kualitatif adalah data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa proses kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya Subagyo, (1997: 67).

Dalam sebuah penelitian, analisis data merupakan hal yang sangat penting

karena data yang sudah diperoleh akan lebih memiliki arti bila telah dianalisis. Kecermatan dalam memilih teknik analisis data deskriptif kualitatif karena data yang didapatkan tidak berupa angka-angka, akan tetapi data berupa fenomena-fenomena dan kasus – kasus dalam bentuk laporan dan karangan sehingga harus dideskripsikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Pada prinsipnya analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan – tahapan dalam proses analisis data kualitatif meliputi:

- a. Reduksi Data yaitu sebuah proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan
- b. Penyajian Data yaitu data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Verifikasi Data yakni menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data yang sudah diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah merdeka dan pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai UUD yang pertama. Meskipun UUD yang tidak dibentuk dan tidak disahkan oleh sebuah lembaga atau badan permusyawaratan/perwakilan rakyat, melainkan dibentuk dan disahkan oleh suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang anggotanya terdiri

dari tokoh-tokoh atau wakil wakil rakyat dari seluruh pelosok tanah air. Akan tetapi UUD 1945 itu adalah sah dan mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat untuk mengatur Negara, karena PPKI adalah merupakan suatu badan resmi sebagai pembentuk Negara Republik Indonesia yang merdeka.

Dalam kenyataannya telah membuktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mengakui, menaati, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta berusaha berjuang membela dan mempertahankan keselamatan bangsa dan Negara Republik Indonesia serta UUD-nya dari segala bentuk penyelewengan, gangguan, rongrong atau ancaman dari pihak-pihak yang berniat untuk mengganti UUD 1945.

Keyakinan dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap kebenaran UUD 1945 dibuktikan pada waktu dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang menggantikan Undang Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS), berarti seluruh bangsa Indonesia mendukung untuk senantiasa ingin hidup di alam UUD 1945.

Undang – Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdiri dari pembukaan dan batang tubuh serta penjelasan resmi, sedangkan pembukaan UUD 1945 menetapkan adanya suatu UUD Negara Indonesia, lagi pula pembukaan UUD 1945 memuat dasar filsafah Negara, pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Berarti kedudukan pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah Negara yang fundamental adalah bersifat tetap, tidak dapat diubah, apalagi diganti, oleh siapa pun dan bilamanapun, termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 merupakan uraian terperinci pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945.

Akan tetapi antara tahun 1945 sampai tahun 1949, sejak ditetapkannya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan mulai berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 (Konstitusi RIS 1949) pada saat pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, ternyata UUD 45 tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pada waktu itu bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman dan gangguan dari luar (Inggris dan Belanda) dan ancaman serta gangguan dari dalam (PKI/FDR atau Frin Demokrasi Rakyat) yang dipimpin oleh Muso di Madiun. Terlebih perhatian bangsa Indonesia sedang diarahkan dalam usaha membela dan mempertahankan serta untuk memenangkan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, sedangkan pihak kolonialis Belanda justru ingin menjajah kembali bekas jajahannya yang telah merdeka ini.

Dengan berlakunya UUD 1945 dan dipilihnya Presiden RI yang pertama yakni Ir. Soekarno dan wakil Drs. Moh. Hatta, maka sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditentukan dalam UUD 1945 seperti MPR, DPR dan DPA belum terbentuk, sedangkan segala alat perlengkapan negara dan sistem kelembagaan pemerintah Negara berjalan lebih lancar.

Dengan berlakunya Aturan Peralihan Pasal IV, kekuasaan presiden menjadi luar biasa yakni di samping menjalankan kekuasaan eksekutif, juga menjalankan kekuasaan MPR, seperti melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya, menetapkan GBHN, menjalankan tugas DPR dengan sepenuhnya di bidang legislatif dan menjalankan tugas DPA, sedangkan kedudukan Komite Nasional dalam menjalankan kekuasaan tersebut hanya sebagai pembantu presiden saja. Maka dibentuklah KNIP yang pada tanggal 29 Agustus 1945 dilantik, anggotanya terdiri dari anggota PPKI ditambah beberapa orang tokoh yang diangkat oleh presiden.

Untuk menjaga agar kekuasaan presiden yang luar biasa itu tidak berlaku terlalu lama, maka PPKI sewaktu menetapkan UUD 1945 mencantumkan Aturan tambahan ayat 2, UUD 1945 yang menyatakan bahwa “dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang Undang Dasar”. Berarti dalam waktu 6 bulan MPR dan DPR sudah harus dibentuk oleh Presiden dan 6 bulan setelah itu atau satu tahun kemudian MPR sudah dapat menetapkan UUD yang definitif.

Namun dalam waktu dua bulan saja Pemerintah RI berlangsung, terdapat gangguan dari pihak Belanda untuk berusaha menjajah kembali tanah air Indonesia ini. Pada tanggal 16 September 1945, Tentara Sekutu (Serikat) yakni Inggris mendarat di Pulau Jawa, dengan tujuan untuk menawan, melucuti senjata Jepang dengan tindakan pengamanannya.

Pada tanggal 17 Oktober 1945 Belanda dan tentara NICA di bawah pimpinan Letnan Gubernur Jendral Van Mook datang ke Indonesia dengan cara membonceng tentara Sekutu yang kenyataannya mereka berusaha untuk menyelundupkan unsur-unsur penjajahan Belanda di Indonesia. Maka berkobarlah dimana-mana perlawanan rakyat Indonesia baik terhadap tentara Sekutu maupun tentara Belanda. Alasan Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali yakni dengan menggunakan pasal aturan peralihan pemerintah Indonesia adalah pemerintah fasis buatan Jepang yang tidak demokratis, karena tidak terdapat partai-partai politik.

Dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No.X Tahun 1945 tanggal 6 Oktober 1945 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN
2. Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang anggotanya dipilih

diantara mereka serta bertanggung jawab kepada KNIP

Dengan berlakunya Maklumat No.X ini, maka kedudukan KNIP menjadi berubah yakni yang semula badan yang hanya pembantu presiden kemudian menjadi badan legislatif dan merangkap sebagai badan yang ikut menetapkan GBHN (sebagai MPR), sedangkan Badan Pekerja KNIP yakni badan yang menjalankan pekerjaan sehari-hari harus bertanggung jawab kepada KNIP. Komite ini diketuai oleh Sultan Syahrir. Maka dengan dikeluarkannya Maklumat ini mengandung arti bahwa kekuasaan Presiden RI makin berkurang. Karena Undang – Undang harus dibuat oleh presiden bersama KNIP. begitu pula halnya untuk menetapkan GBHN dipegang oleh presiden bersama-sama KNIP. Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945 tersebut, kemudian dikeluarkannya Maklumat Badan Pekerja KNIP tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran pemerintah kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik sebagai sarana pembantu perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini telah mengakibatkan di Indonesia kemudian timbul suatu sistem banyak partai *multy party system*. Sebenarnya dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No.X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Badan Pekerja KNIP tanggal 3 November 1945 itu adalah sebagai jawaban atas tuduhan Belanda yang dengan dalih menggunakan pasal Aturan Peralihan UUD 1945, telah menyebarluaskan pemberitaan palsu ke seluruh dunia bahwa pemerintah Indonesia bersifat diktatur ala fasis buatan Jepang yang harus dicegah dan diberantas.

Belanda menganggap bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil pemberian atau merupakan warisan dari pemerintah Jepang. Sementara itu terjadilah penyimpangan konstitusi, di mana pemerintah tidak mempergunakan cara pengendalian kekuasaan yang dibatasi oleh

ketentuan – ketentuan dan hukum yang lain sebagai produk konstitusi seperti GBHN, Undang-Undang dan sebagainya. Padahal Negara RI ini adalah Negara hukum yang demokratis, berarti pemerintah berdasarkan atas asas konstitusi (hukum dasar) tidak berifat absolutisme (kekuasaan tak terbatas).

Sebagai penyimpangan konstitusi yang pertama dan yang paling prinsipil terjadi sewaktu dikeluarkannya Maklumat Badan Bekerja No.5 tanggal 11 November 1945 atas usul Badan Pekerja KNIP, yang kemudian di setujui oleh Presiden yakni mengenai adanya perubahan dari sistem kabinet Presidensil mulai tanggal 14 November 1945 menjadi sistem Parlemen. Maka dengan dikeluarkannya Maklumat Badan Pekerja No. 5 itu, terjadilah suatu perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah dari sistem pertanggungjawaban presiden kepada MPR, berubah menjadi sistem pertanggungjawaban menteri-mentri kepada parlemen atau sebagai kabinet ministril. Atau dari sistem pemisahan kekuasaan atau sistem presidensil seperti yang berlaku di Amerika Serikat ke sistem parlemater seperti yang berlaku dikebanyakan Negara-Negara Eropa barat.

Dari perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dari tahun 1945-1949 lembaga yang berperan penting di dalamnya merupakan lembaga kepresidenan dengan Komite Nasional Indonesia Pusat karna pada saat itu hanya dua lembaga ini lah yang ada.

1. Lembaga Negara KNIP

Keputusan PPKI dalam sidangnya I bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk memenuhi Pasal IV Peraturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden

dengan segala bantuan sebuah Komite Nasional” Widjaja, (1987: 11). Dalam melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal IV Aturan Peralihan, maka KNIP berfungsi sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung sebelum badan badan ini dapat dibentuk.

Pada tanggal 29 Agustus malam bertempat di Gedung Komidi Pasar Baru, Jakarta, pengurus dan anggota KNIP dilantik, dan sidang pertamanya dimulai sesudahnya. Sidang ini diketuai Kasman Singodimejo, sebagai ketua Panitia Eksekutif. Kasman Singodimejo, sebagai ketua Panitia Eksekutif, selesai pidato pembukaanya menghadap presiden dengan berdiri sebagai perwira bawahan dan menyatakan “siap sedia menjalankan perintah”. Maka presiden pun melantik segenap anggota. Ia menegaskan bahwa “kekuasaan adalah di tangan presiden...” berarti KNIP merupakan pembantu untuk menjalankan kekuasaan ini Noer, (2005:23).

Pelantika KNIP langsung disusun di sidang I dan terpilih pemimpinnya yakni sebagai berikut sebagai ketua Mr. Kasman Singodimejo, wakil ketua I Mr. Sutarjo Kartohadikusumo, wakil ketua II Mr. J. Latuharhary dan wakil ketua II Adam Malik. Adapun pembentukan KNIP dan keanggotaanya berdasarkan penunjukan yang diusulkan oleh para perintis kemerdekaan dan tokoh tokoh politik yang aktif dalam gerakan kemerdekaan serta gabungan dari anggota PPKI. Keanggotaan KNIP dan BP-KNIP jumlahnya selalu berbeda-beda. Pada tanggal 29 Agustus 1945 berjumlah 137 orang dengan ketuanya Kasman Singadimejo, wakil Ketua I Mas Soetarjo Kartohadikoesoemo, wakil ketua II Mr. Latuharhary dan wakil ketua III Adam Malik. Situasi yang mendesak untuk melakukan reformasi, maka dengan keluarnya maklumat X, maka dibentuklah BP-KNIP dan menggeser kedudukan Kasman

Singadimejo adalah Sutan Syahrir Noer, (2005: 34).

Dari keanggotaan KNIP di atas maka fungsi dan kedudukan KNIP pada awalnya yang berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa KNIP dibentuk untuk membantu kegiatan Presiden.

Berdasarkan Pasal VI Aturan Peralihan fungsi KNIP yakni: menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, mempersatukan rakyat dari segi lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat, membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum dan membantu pemimpin dalam meyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum Noer, (2005: 19).

Fungsi KNIP pada saat itu untuk membantu Presiden tampaknya menimbulkan masalah baru yakni “munculnya dualisme dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Misalnya, KNIP bertindak sebagai juru penerangan padahal kementerian penerangan sudah terbentuk” Noer, (2005: 26). Dari masalah yang timbul pada saat itu mengenai fungsi dan kedudukan KNIP muncul kritik-kritik terhadap Pasal VI Aturan Peralihan UUD, yang menurut mereka menggambarkan kekuasaan tidak terbatas pada Presiden/Pemerintah, cermin dari fasisme Jepang. Oleh sebab itu mereka mendesak untuk mengubah kedudukan dan fungsi KNIP menjadi lembaga yang perpijak atas dasar demokrasi secara nyata. Untuk itu dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden No.X (dibaca eks) pada tanggal 16 Oktober 1945.

Dengan demikian fungsi KNIP berkembang menjadi fungsi legislatif yang mempunyai fungsi untuk turut menentukan Undang-Undang dan mengawasi atau mengontrol pelaksanaan Undang-Undang

bersama Presiden. Selain itu KNIP juga berusaha mengurus berbagai masalah yang menyangkut kepentingan umum baik yang ada di dalam negeri atau yang menyangkut kepentingan Indonesia dengan negara luar seperti Belanda, untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari KNIP dibantu oleh Badan Pekerja KNIP atau BP-KNIP.

Setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X yang sebelumnya fungsi KNIP mengacu pada pasal IV Aturan Peralihan yang memberikan kekuasaan Presiden tidak terbatas yang merupakan cermin dari fasisme Jepang tetapi setelah ada Maklumat Wakil Presiden terjadilah pengurangan kekuasaan Presiden dengan tanpa mengubah ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan itu sendiri, baik mengubah secara langsung ataupun mengubah secara amandemen.

Pada penjelasan mengenai Maklumat Wakil Presiden No. X maka Badan Pekerja berkewajiban dan berhak:

1. Turut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Ini berarti bahwa badan pekerja bersama-sama dengan presiden menetapkan garis-garis besar haluan negara. Badan dan pekerja tidak berhak campur dalam kebijaksanaan pemerintah sehari-hari ini tapi ditangan Presiden semata-mata.
2. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang yang boleh mengenai segala macam urusan pemerintah, yang menjalankan Undang-Undang ini ialah Pemerintah. Artinya, Presiden dibantu oleh mentri-mentri dan pegawai-pegawai yang dibawahnya Joeniarto (1996: 50).

KNIP menjalankan tugasnya seperti hal layaknya Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu karena telah keluarnya Maklumat Wakil Presiden yang tadinya fungsi KNIP hanya sebagai pembantu Presiden, sehingga diberikan kekuasaan sebagai lembaga legislatif. Dari awal terbentuknya hingga dibubarkan KNIP mengadakan empat kali sidang yang

pertama diadakan pada 29 Agustus 1945 di Jakarta dan yang terakhir pada tanggal 15 Desember 1945 di Yogyakarta. Komite Nasional Indonesia Pusat terutama badan pekerja merupakan lambang dari dukungan rakyat kepada perjuangan kemerdekaan.

Sejak proklamasi kemerdekaan samapai pulihnya kembali Negara Kesatuan RI tanggal 17 Agustus 1950. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia maupun Komite Nasional Indonesia sendiri telah menyetujui 133 Rancangan Undang Undang menjadi Undang Undang diantaranya yang terpenting adalah UU No.11 Tahun 1949 tentang pengesahan konstitusi Republik Indonesia Serikat, mengeluarkan 6 mosi dan 2 interpelasi Budiardjo, (2003: 190).

Dengan demikian Komite Nasional Indonesia bukanlah semata mata sebagai pembantu presiden saja tetapi menjadi badan yang juga berwenang bersama-sama dengan Presiden melaksanakan wewenang perundang – undangan dan malahan ikut pula menetapkan garis besar dari haluan Negara.

3. Lembaga Kepresidenan

Pertama Negara Republik Indonesia baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan satu hari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945 terlihat ketika para *founding fathers* para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang sedang menyusun Rancangan UUD 1945 masuk sesi rehat, para wartawan yang sedang menunggu di luar saat meliput proses penyusunan Rancangan UUD 1945 langsung menanyakan kepada mereka siapakah yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dari negara yang baru terbentuk pada saat itu.

Kebetulan pada saat mengakhiri sidang sebelum rehat, para anggota PPKI belum sampai kepada tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena adanya pertanyaan dari para wartawan itu, ketika sesi istirahat sudah selesai dan

pembahasan dimulai kembali, Ketua PPKI Ir. Soekarno yang kemudian terpilih menjadi presiden pertama RI, mengarahkan para anggota PPKI yang menjadi peserta rapat untuk masuk ke agenda pemilihan presiden dan wakil presiden terlebih dahulu, sebelum melanjutkan pembahasan rancangan pasal-pasal UUD 1945 Karena pada saat itu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dalam Rancangan UUD 1945 dikonsep sebagai lembaga yang berwenang memilih presiden dan wakil presiden belum terbentuk, maka para anggota PPKI kemudian menyetujui penetapan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Aturan Peralihan Pasal III disebutkan “untuk pertama kali Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”. Berdasarkan ketentuan yang hanya berlaku satu kali saja, kemudian dilakukanlah proses singkat untuk memilih presiden dan wakil Presiden yang pertama kalinya dalam sejarah republik ini. Dan Soekarno – Hatta pun kemudian terpilih secara aklamasi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama.

Setelah sidang PPKI 18 Agustus 1945 dilaksanakan memutuskan tiga hal pokok dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Dalam sidang itu maka Indonesia sudah memiliki Presiden dan wakil Presiden sebagai kepala Negara yang tertera pada Alenia IV Pembukaan UUD 1945 berbunyi “..kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..” hal mana jelas memberikan ketentuan bahwa negara demokrasi Indonesia berbentuk Republik ini dikehendaki adanya pengangkatan kepala negara yang dipilih oleh rakyat dan memangku jabatannya

selama periode yang telah ditentukan menurut aturan hukum yang berlaku Mahfud, (2001: 113).

Dalam hal ini pembentukan Kepala Negara yang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Alenia IV. Dalam melaksanakan tugasnya presiden dibantu oleh seseorang wakil presiden dengan demikian wakil presiden bertugas membantu presiden. Dalam kenyataannya selama ini hubungan kerjasama antar presiden dengan wakil presiden ditentukan oleh presiden setelah mengadakan pembicaraan dengan wakil presiden seperti ketika presiden berhalangan hadir tetapi maka ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

Kedudukan kepala Negara berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa meskipun kepala Negara Indonesia tidak bertanggung jawab kepada DPR maka ia bukanlah “dictator” artinya kekuasaan tidak tak terbatas oleh karena dalam melaksanakan tugas eksekutif presiden (lembaga Presiden) tak luput dari pengamat MPR, sesuai lembaga Negara tertinggi yang berwenang memberhentikan presiden walaupun belum habis masa jabatannya.

Dalam kedudukannya Presiden adalah kepala Negara menurut UUD 1945 Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang Undang Dasar artinya kekuasaan eksekutif dalam Negara. sehingga pada awal kemerdekaan setelah dibentuknya pemerintahan Republik Indonesia segala sesuatu keputusan masih ditangan Presiden. Dan pada masa peralihan penyelenggaraan pemerintah yang menurut bunyi pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, maka sebelum MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) disebut menurut UUD 1945 segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Jelas menurut ketentuan ini bahwa segala kekuasaan

kenegaraan dalam masa peralihan berada dalam tangan Presiden, sedangkan Komite Nasional adalah semata-mata membantu Presiden. Jadi, hanya sekedar memberikan pertimbangan – pertimbangan dan usul-usul, sedangkan kekuasaan eksekutif menurut Wynes dalam buku yang berjudul *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* ia mengatakan bahwa dapat didefinisikan sebagai “kekuasaan dalam Negara yang melaksanakan Undang Undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan dan keamanan baik di dalam maupun di luar negeri” Suny, (1986: 29).

Kekuasaan umum dari Eksekutif (presiden dan wakil) adalah berasal dari Undang Undang Dasar dan Undang Undang yakni termasuk kekuasaan:

1. Kekuasaan administratif yaitu pelaksanaan Undang Undang dan politik administratif
2. Kekuasaan legislatif yakni mengajukan Rancangan Undang Undang dan mengesahkan Undang Undang
3. Kekuasaan yudikatif yakni kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesty
4. Kekuasaan militer yakni kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan
5. Kekuasaan diplomatic yakni kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri Suny, (1986 : 29).

Penyerahan kekuasaan penuh ke tangan Presiden pada pertama dan kedua kalinya dilaksanakan dengan Maklumat Presiden, yang dengan tegas menyatakan bahwa presiden “memegang kekuasaan pemerintah sepenuhnya untuk sementara waktu” sedangkan mengenai penyerahan kekuasaan yang ketiga kalinya, kabinet dengan persetujuan Badan Pekerja membentuk sebuah Undang Undang yang diberikan kepada presiden. Kekuasaan penuh untuk menjalankan tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan - peraturan dengan menyimpang dari Undang Undang dan peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil yang diperoleh hubungan kerjasama yang dilakukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Lembaga Kepresidenan pada tahun 1945-1949 dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan kedua lembaga, kerjasama yang dilakukan pada awal kemerdekaan yang pertama kali meliputi penyelesaian perjanjian dengan Belanda. Kerjasama yang dilakukan ketika bersama-sama dalam meratifikasi Perjanjian Linggarjati. Disinilah peran KNIP sebagai lembaga Legislatif sangat terlihat.

Pada saat awal pelaksanaan perundingan dengan Belanda yang dilakukan oleh Sultan Sahrir yang bertujuan untuk memberhentikan konflik antar Indonesia dengan Belanda dan Indonesia mendapatkan pengakuan secara *de facto* oleh Belanda.

Dalam perundingan yang pertama menghasilkan sebuah Naskah dan kesepakatan antar Indonesia dengan Belanda yakni Naskah Perjanjian Linggarjati dan naskah ini harus di ratifikasi oleh masing-masing parlemen. Disinilah peran KNIP sebagai lembaga legislatif sangat berperan. Karena perjanjian Linggarjati ini mendapatkan pro dan kontra oleh masyarakat Indonesia maka dalam pembahasan mengenai Perjanjian Linggarjati yang dilaksanakan pada sidang pleno KNIP di Malang tanggal 5 Februari - 5 Maret 1947 sangat panjang dalam pembahasannya.

Dalam sidang pleno ini pun tidak hanya membahas mengenai perjanjian Linggarjati tetapi membahas juga mengenai keluarnya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1946 mengenai pembaharuan keanggotaan KNIP sehingga pada saat itu banyak terjadi kecaman yang dituduhkan oleh Presiden, kecaman itu berupa dalih bahwa presiden dengan mengeluarkan PP No.6 Tahun 1946 itu supaya Perjanjian Linggarjati dapat di ratifikasi dan di setujui oleh KNIP tapi, kecaman itu ditolak oleh Presiden dan mengatakan bahwa walaupun Presiden tidak mengeluarkan PP No.6 Tahun 1946 Perjanjian Linggarjati tetap di

ratifikasi oleh KNIP karena 2/3 dari anggota KNIP sudah menyetujui. Dengan ini kerjasama KNIP dengan Presiden dalam penyelesaian perjanjian dengan Belanda bersama-sama menginginkan Naskah Linggarjati dapat disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia.

Setelah kerjasama antara KNIP dengan Presiden dalam menyelesaikan perjanjian dengan Belanda seiring pembahasan mengenai Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1946 kerjasama yang dilakukan KNIP dengan Presiden selanjutnya mengenai pembaharuan lembaga negara, karena lembaga negara di Indonesia yang paling banyak mendapatkan sorotan baik dari dalam negeri maupun luar negeri adalah KNIP maka seiring waktu berjalan KNIP memperbaiki keanggotaan dan sistem dalamnya.

Pembaharuan lembaga KNIP ini pun mendapat perhatian Presiden maupun para anggota KNIP sendiri, sehingga usaha untuk memperbaharui keanggotaan KNIP maka pada tanggal 18 April Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1946 tentang Pembaharuan KNIP. Tetapi Peraturan Pemerintah tersebut dibatalkan setelah RUU No. 12 Tahun 1964 tentang pembaharuan susunan KNIP yang dimajukan oleh pemerintah disetujui oleh BP KNIP dalam sidangnya tanggal 7 Juni untuk menjadi Undang Undang. Undang Undang itu tidak dapat dilaksanakan Badan Pekerja sehingga terjadi perdebatan dan mengusahakan diamandemenkan Undang Undang itu, tetapi tak pernah mencapai penyelesaian terakhir. Setelah itu Presiden dengan Peraturan Presiden Tahun 1946 No. 6 menetapkan penambahan anggota KNP dari 200 menjadi 514 orang.

Mengenai Peraturan Presiden No.6 Tahun 1946 ini tidak berkesudahan maka pada "sidang BP pada tanggal 6 Januari 1947 merupakan perdebatan antar anggota yang pro dan kontra terhadap PP No.6/1947. Tetap perdebatan anggota KNIP berakhir karena pada saat itu yang

dapat mengambil keputusan mengenai PP No.6/1946 adalah anggota KNIP sendiri sehingga perdebatan berakhir dan perubahan KNIP disetujui oleh seluruh anggota KNIP.

Kerjasama yang dilakukan KNIP dengan Lembaga Kepresidenan untuk menjalankan sistem pemerintah, KNIP sebagai lembaga legislatif sudah hal tentunya menjalankan tugas bersama Presiden dalam merancang sebuah Undang-Undang.

KNIP sendiri dalam merancang Undang Undang dibantu oleh Badan Pekerja KNIP yang melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 10 hari sekali. Pada tanggal 22 Oktober – 25 November 1945 kegiatan BP-KNIP sangat sibuk karena dalam satu bulan BP-KNIP menyampaikan usul kepada pemerintah dan pemerintah menyambutnya dengan baik. Dalam usulan-usulan yang diberikan oleh BP-KNIP dalam kurun waktu tahun 1945-1949 menyetujui 133 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang diantaranya yang terpenting adalah Undang-Undang No.11 Tahun 1949 tentang pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, mengeluarkan 6 Mosi dan 2 Interplerasi. Dari semua rancangan sudah mendapat persetujuan dan pertimbangan dari presiden sehingga menjadi sebuah Undang-Undang untuk mengatur jalannya pemerintahan. Kerjasama inilah yang dilakukan KNIP dengan Lembaga Kepresidenan untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan UUD 1945.

Kerjasama selanjutnya yang dilakukan KNIP dengan Lembaga Kepresidenana menetapkan GBHN, Komite Nasional Indonesia pusat (KNIP) yang pada Maklumat No.X disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga kedudukan KNIP semakin penting. GBHN merupakan pernyataan keinginan rakyat yang menjadi acuan utama atas segala kiproh penyelenggara negara dalam mewujudkan

cita-cita bangsa bernegara, yang secara eksplisit tersurat didalam pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya, bentuk operasional dari GBHN ini selama beberapa dekade diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Nasional. Dalam Rencana pembangunan Nasional, Pemerintah menunjukan rencana itu dalam sektor perekonomian yang sesuai dengan UUD 1945 yang tertera pada pasal 33 UUD 1945.

Sejak awal kemerdekaan, sistem perekonomian Indonesia dijalankan sesuai amanat UUD 45 tersebut. Sehingga untuk tercapainya rancangan pembangunan maka dibentuk “Dasar Pokok dari pada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia“ yang perancangan pada saat itu diketuai oleh Moh.Hatta.

Keadaan negara pada saat itu mengakibatkan plan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sampai akhirnya dibuat dokumen lain berupa perencanaan beberapa sektor perekonomian, rencana ini dikenal sebagai Plan Produksi Tiga tahun RI. Rentang waktu dari plan itu antara 1948 sampai dengan 1950. Kerjasama yang dilakukan KNIP pada saat itu menyetujui segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bersama Presiden.

Dapat dilihat bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan KNIP dengan Lembaga Kepresidenan tidak lepas dari kekuasaan Presiden seutuhnya karena, pada saat itu kekuasaan presiden masih mutlak ada dan hubungan kerjasama yang dilakukan secara utuh sesuai dengan fungsi dan tujuan masing – masing lembaga yakni merumuskan Undang-Undang atau fungsi Legislatif antar kedua lembaga yakni KNIP dengan Lembaga Kepresidenan berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Dalam sejarah KNIP mencatat bahwa satu kali dalam sejarah kerjasama KNIP dengan Lembaga Kepresidenan terjadi konflik antar mereka mengenai Undang-Undang pembaharuan KNIP dan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.6

tahun 1949. Dari kerjasama yang dilakukan KNIP dengan Lembaga Kepresidenan tidak jauh dari kekuasaan yang dimiliki Presiden yang memegang segala sesuatunya masih berada ditangan Dwitunggal Soekarno-Hatta. Hubungan kerjasama antar lembaga tersebut berjalan baik walaupun terdapat konflik di dalamnya, sehingga hubungan tersebut masih baik dengan terbukti bahwa tidak adanya program kabinet yang tidak disetujui oleh Badan Pekerja KNIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Mariam. 2003. *Dasar Dasar Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Joeniarto. 1996. *Sejarah Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjoroningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- MD, Mahfud. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Noer, Deliar & Akbarsyah. 2005. *Komite Nasional Indonesia (KNIP) Parlemen Indonesia 1945-1950*. Jakarta: Yayasan Risalah.
- Notosusanto, Nugroho. 1964. *Hakekat Sejarah dan Asas-Asas Metode Sejarah*. Bandung: ISBA.
- Suny, Ismail. 1986. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Widjaja, A.W.1987. *Dekrit Presiden 5 Juli 1956 dan UUD Negara Indonesia dalam Lintas Sejarah Dua Dasawarsa 1945-1965*. Jakarta: Fajar Agung.